

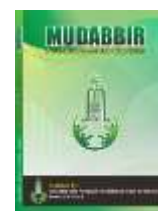


JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Dampak Kenaikan Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Buruh di Sektor Industri

Muhammad Kalkautsar¹, Fauziah Ahmad Zain Nainggolan², Vidiani Br Sembiring³,
Nabelia Utami Manurung⁴

^{1,2,3}Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: Email: ¹muhammadkalkautsar01@gmail.com, ²fauziahahmadzain@gmail.com,
³Vidianisemb@gmail.com, ⁴abeliautamimrg@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan upah minimum merupakan instrumen penting dalam sistem ketenagakerjaan yang bertujuan menjamin standar hidup layak bagi buruh. Di sektor industri, kebijakan ini sering menjadi perdebatan karena di satu sisi diharapkan meningkatkan kesejahteraan buruh, namun di sisi lain dianggap dapat menambah beban biaya produksi perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan upah minimum terhadap kesejahteraan buruh di sektor industri dengan meninjau berbagai literatur akademik dan kebijakan ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum secara umum berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan, daya beli, dan kualitas hidup buruh industri. Namun demikian, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung, seperti penyesuaian tenaga kerja dan efisiensi produksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum perlu diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan dukungan kebijakan industri agar kesejahteraan buruh dan keberlanjutan sektor industri dapat tercapai secara seimbang.

Kata Kunci: Upah Minimum, Kesejahteraan Buruh, Sektor Industri, Kebijakan Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

The minimum wage policy is a crucial instrument in the employment system, aiming to ensure a decent standard of living for workers. In the industrial sector, this policy is often debated because, on the one hand, it is expected to improve worker welfare, but on the other hand, it is considered to increase the burden of production costs for companies. This article aims to analyze the impact of minimum wage increases on worker welfare in the industrial sector by reviewing various academic literature and employment policies. The research method used is a literature review with a qualitative-descriptive approach. The results of the study indicate that minimum wage increases generally have a positive impact on increasing income, purchasing power, and quality of life for industrial workers. However, this policy also has the potential to have indirect impacts, such as workforce adjustments and production efficiency by companies. Therefore, minimum wage policies need to be accompanied by increased labor productivity and support from industrial policies to achieve a balance between worker welfare and the sustainability of the industrial sector.

Keywords: Minimum Wage, Worker Welfare, Industrial Sector, Employment Policy.

PENDAHULUAN

Upah merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem ketenagakerjaan yang memiliki peran strategis dalam menentukan tingkat kesejahteraan buruh. Dalam perspektif ekonomi, upah dipahami sebagai bentuk kompensasi atas tenaga, waktu, dan keterampilan yang disumbangkan buruh kepada perusahaan dalam proses produksi. Namun, upah tidak semata-mata memiliki makna ekonomis, melainkan juga mengandung dimensi sosial dan moral karena berkaitan langsung dengan kemampuan buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur sistem pengupahan melalui kebijakan upah minimum sebagai instrumen perlindungan bagi buruh, khususnya bagi kelompok pekerja dengan posisi tawar yang lemah di pasar tenaga kerja (Mankiw, 2021).

Kebijakan upah minimum bertujuan untuk menetapkan batas bawah tingkat upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada buruh. Penetapan upah minimum didasarkan pada pertimbangan kebutuhan hidup layak, produktivitas tenaga kerja, serta kondisi perekonomian. Dalam konteks negara berkembang, kebijakan ini memiliki urgensi yang tinggi karena masih banyak buruh yang bekerja di sektor formal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. International Labour Organization (2022) menegaskan bahwa kebijakan upah minimum yang dirancang dan diimplementasikan secara tepat dapat berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan pekerja, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta peningkatan daya beli masyarakat. Dengan demikian, upah minimum tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan sosial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang berdampak luas.

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh kebijakan kenaikan upah minimum. Sektor ini memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena menjadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Industri manufaktur, khususnya, menjadi tulang punggung dalam penciptaan lapangan kerja formal. Namun, karakteristik sektor industri yang padat karya dan padat modal menjadikannya sangat sensitif terhadap perubahan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja. Kenaikan upah minimum sering dipersepsikan sebagai faktor yang dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan dan menurunkan daya saing, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat (Boeri & van Ours, 2021).

Di sisi lain, bagi buruh industri, kenaikan upah minimum dipandang sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan buruh tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan nominal, tetapi juga dari kemampuan buruh dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Aspek kesejahteraan mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang layak, pendidikan bagi anggota keluarga, kondisi perumahan yang memadai, serta jaminan keamanan dan kepastian kerja. Menurut Kaufman (2020), buruh yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik cenderung menunjukkan tingkat kepuasan kerja dan produktivitas yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Meskipun secara teoritis kenaikan upah minimum diharapkan meningkatkan kesejahteraan buruh, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampaknya tidak selalu bersifat linier. Di satu sisi, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan buruh dan mengurangi kesenjangan upah. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan penyesuaian, seperti pengurangan tenaga kerja, pembatasan perekrutan baru, atau peningkatan penggunaan teknologi dan otomatisasi sebagai upaya efisiensi biaya. OECD (2020) mencatat bahwa dampak kebijakan upah minimum sangat bergantung pada struktur pasar tenaga kerja, tingkat produktivitas, serta kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai kenaikan upah minimum di sektor industri semakin mengemuka seiring dengan dinamika ekonomi dan perubahan regulasi ketenagakerjaan. Di satu pihak, buruh menuntut kenaikan upah minimum yang lebih signifikan untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup dan inflasi. Di pihak lain, pengusaha industri mengkhawatirkan dampak kenaikan upah terhadap kelangsungan usaha dan iklim investasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kepentingan yang perlu dijembatani melalui kebijakan yang berbasis pada kajian ilmiah dan bukti empiris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai dampak kenaikan upah minimum terhadap kesejahteraan buruh di sektor industri menjadi sangat relevan dan penting. Pemahaman yang komprehensif mengenai dampak kebijakan ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan upah minimum terhadap kesejahteraan buruh di sektor industri melalui kajian literatur ilmiah dan kebijakan ketenagakerjaan terkini, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi hubungan industrial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam dampak kenaikan upah minimum terhadap kesejahteraan buruh di sektor industri berdasarkan kajian teori, temuan empiris, dan kebijakan ketenagakerjaan yang relevan. Metode studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep, dinamika, serta implikasi kebijakan upah minimum tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah. Data tersebut meliputi buku teks ekonomi dan ketenagakerjaan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan upah minimum dan kesejahteraan buruh. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi tahun 2019–2025 agar data dan analisis yang dihasilkan relevan dengan kondisi ketenagakerjaan terkini, khususnya di sektor industri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai basis data ilmiah, seperti Google Scholar, portal jurnal nasional terakreditasi, serta publikasi resmi dari lembaga internasional dan institusi pemerintah. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran literatur antara lain “upah minimum”, “kesejahteraan buruh”, “sektor industri”, “kebijakan ketenagakerjaan”, dan “*labor welfare*”. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, serta kesesuaian dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Tahap pertama analisis adalah pengelompokan data berdasarkan tema utama penelitian, yaitu konsep upah minimum, kesejahteraan buruh, dampak ekonomi kenaikan upah minimum, serta implikasi kebijakan bagi sektor industri. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi gagasan pokok, temuan penelitian, dan argumen utama yang disampaikan dalam setiap sumber pustaka. Tahap kedua adalah interpretasi data, yaitu menafsirkan dan mengaitkan temuan-temuan tersebut untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara kenaikan upah minimum dan kesejahteraan buruh.

Dalam penelitian ini, kesejahteraan buruh dianalisis tidak hanya dari aspek pendapatan, tetapi juga dari dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Indikator kesejahteraan buruh yang dikaji meliputi kemampuan memenuhi kebutuhan hidup layak, daya beli, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta stabilitas dan keamanan kerja. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan upah minimum terhadap kehidupan buruh di sektor industri.

Untuk menjaga validitas dan keandalan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, dan laporan kebijakan. Apabila terdapat perbedaan pandangan atau hasil penelitian, peneliti menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut, seperti konteks wilayah, karakteristik sektor industri, dan kondisi ekonomi pada periode penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak, melainkan mencerminkan keragaman perspektif ilmiah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak melibatkan data primer yang diperoleh langsung dari buruh atau perusahaan industri. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih bersifat konseptual dan berbasis pada temuan-temuan penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, kajian kepustakaan tetap memiliki nilai penting dalam memberikan landasan teoretis dan empiris bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini dirancang untuk memberikan analisis yang sistematis dan mendalam mengenai dampak kenaikan upah minimum terhadap kesejahteraan buruh di sektor industri. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan upah minimum yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan kenaikan upah minimum merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ketenagakerjaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan buruh. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur ilmiah dan dokumen kebijakan periode 2019–2025, ditemukan bahwa kenaikan upah minimum memberikan dampak yang kompleks terhadap kesejahteraan buruh di sektor industri. Dampak tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, dan hubungan industrial, serta memunculkan tantangan tersendiri bagi keberlanjutan sektor industri.

Dampak Kenaikan Upah Minimum terhadap Pendapatan dan Daya Beli Buruh

Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum secara langsung berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan buruh, khususnya buruh dengan tingkat upah rendah di sektor industri. Peningkatan pendapatan ini memungkinkan buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar secara lebih layak, seperti kebutuhan pangan, perumahan, dan transportasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berkontribusi pada peningkatan daya beli buruh, yang pada gilirannya mendorong konsumsi rumah tangga sebagai salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi (Suryahadi et al., 2019).

Dalam konteks sektor industri, peningkatan daya beli buruh juga berdampak pada perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga buruh. Buruh yang sebelumnya berada pada kondisi rentan secara ekonomi memiliki peluang lebih besar untuk menabung atau mengalokasikan pendapatan bagi kebutuhan jangka panjang, seperti pendidikan anak dan jaminan kesehatan. Dengan demikian, kenaikan upah minimum dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi buruh secara berkelanjutan.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa dampak peningkatan pendapatan akibat kenaikan upah minimum tidak selalu merata. Buruh yang bekerja di perusahaan besar dan formal cenderung lebih mampu menikmati manfaat kebijakan ini dibandingkan buruh di industri kecil dan menengah. Perbedaan kapasitas perusahaan dalam menyesuaikan struktur biaya menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat manfaat yang diterima buruh.

Dampak terhadap Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Hidup Buruh

Selain meningkatkan pendapatan, kenaikan upah minimum juga berdampak pada aspek kesejahteraan sosial buruh. Kesejahteraan sosial mencakup kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kondisi kerja yang lebih manusiawi. International Labour Organization (2022) menegaskan bahwa kebijakan upah minimum yang memadai dapat menurunkan tingkat kemiskinan pekerja serta meningkatkan rasa aman secara ekonomi.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa buruh industri yang memperoleh upah lebih tinggi cenderung memiliki tingkat stres ekonomi yang lebih rendah. Kondisi ini berdampak positif terhadap kesehatan mental dan fisik buruh, yang selanjutnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas kerja. Buruh yang merasa kebutuhan dasarnya terpenuhi juga cenderung memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi, sehingga dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis antara buruh dan pengusaha (Kaufman, 2020).

Dari perspektif sosial, peningkatan kesejahteraan buruh berpotensi mengurangi konflik ketenagakerjaan, seperti mogok kerja dan perselisihan hubungan industrial. Buruh yang memperoleh upah layak cenderung memiliki kepercayaan yang lebih besar

terhadap kebijakan perusahaan dan pemerintah. Dengan demikian, kenaikan upah minimum tidak hanya berdampak pada individu buruh, tetapi juga pada stabilitas sosial dan hubungan industrial secara lebih luas.

Dampak Kenaikan Upah Minimum terhadap Sektor Industri

Meskipun memberikan manfaat bagi buruh, kenaikan upah minimum juga menimbulkan tantangan bagi sektor industri. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan, terutama pada industri yang padat karya. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai penyesuaian guna menjaga efisiensi dan profitabilitas, seperti pengendalian biaya operasional, restrukturisasi tenaga kerja, atau penundaan ekspansi usaha (Boeri & van Ours, 2021).

Beberapa literatur juga menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan otomatisasi sebagai alternatif pengurangan biaya tenaga kerja. Meskipun langkah ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, di sisi lain berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja, terutama bagi buruh dengan tingkat keterampilan rendah. Oleh karena itu, dampak kebijakan upah minimum terhadap kesempatan kerja di sektor industri perlu dicermati secara hati-hati.

Namun demikian, dampak negatif terhadap sektor industri tidak bersifat mutlak. OECD (2020) menyatakan bahwa perusahaan yang mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja cenderung lebih mampu menyerap dampak kenaikan upah minimum tanpa harus mengurangi jumlah tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara upah minimum dan kinerja industri sangat dipengaruhi oleh tingkat produktivitas dan inovasi perusahaan.

Implikasi Kebijakan dan Hubungan Industrial

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan upah minimum perlu dipandang sebagai bagian dari sistem kebijakan ketenagakerjaan yang lebih luas. Kenaikan upah minimum yang tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan yang bersifat komplementer, seperti program pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta insentif bagi industri yang mematuhi ketentuan upah minimum.

Dalam konteks hubungan industrial, kenaikan upah minimum juga memiliki implikasi terhadap dinamika hubungan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Dialog sosial yang konstruktif menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan upah minimum yang adil dan berkelanjutan. Keterlibatan serikat buruh dan asosiasi

pengusaha dalam proses penetapan upah minimum dapat meningkatkan legitimasi kebijakan serta mengurangi potensi konflik.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan buruh di sektor industri, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan bagi sektor industri yang perlu diatasi melalui kebijakan pendukung yang tepat. Dengan pendekatan kebijakan yang seimbang dan berbasis pada kajian ilmiah, kenaikan upah minimum dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kesejahteraan buruh tanpa menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan sektor industri.

KESIMPULAN

Kebijakan kenaikan upah minimum merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ketenagakerjaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan buruh, khususnya di sektor industri. Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kenaikan upah minimum memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kesejahteraan buruh, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Kebijakan ini berperan sebagai mekanisme perlindungan bagi buruh berupah rendah agar mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dari aspek ekonomi, kenaikan upah minimum terbukti berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan daya beli buruh industri. Peningkatan pendapatan tersebut memungkinkan buruh untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan dengan lebih baik. Selain itu, peningkatan daya beli buruh juga berimplikasi pada meningkatnya konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu buruh, tetapi juga memiliki efek lanjutan terhadap dinamika ekonomi secara lebih luas.

Dari sisi sosial, kenaikan upah minimum berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup buruh. Buruh dengan tingkat pendapatan yang lebih layak cenderung memiliki tingkat stres ekonomi yang lebih rendah, kondisi kesehatan yang lebih baik, serta rasa aman dan kepastian dalam bekerja. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kepuasan dan motivasi kerja, yang pada akhirnya dapat memperkuat hubungan industrial antara buruh dan pengusaha. Peningkatan kesejahteraan sosial buruh juga berpotensi mengurangi konflik ketenagakerjaan dan menciptakan stabilitas sosial di lingkungan kerja maupun masyarakat.

Namun demikian, kebijakan kenaikan upah minimum juga menimbulkan tantangan bagi sektor industri. Peningkatan biaya tenaga kerja dapat memengaruhi struktur biaya produksi perusahaan, terutama pada industri yang bersifat padat karya. Dalam beberapa kasus, perusahaan merespons kenaikan upah minimum dengan melakukan efisiensi, restrukturisasi tenaga kerja, atau peningkatan penggunaan teknologi dan otomatisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan upah minimum tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat produktivitas tenaga kerja, kapasitas perusahaan, dan kondisi ekonomi secara umum.

Oleh karena itu, kebijakan kenaikan upah minimum perlu dirancang secara komprehensif dan berimbang. Penetapan upah minimum hendaknya mempertimbangkan kebutuhan hidup layak buruh sekaligus kemampuan sektor industri dalam menyerap kebijakan tersebut. Pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan upah minimum dengan kebijakan peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan keterampilan, serta pemberian insentif bagi industri agar tetap mampu bersaing. Pendekatan kebijakan yang terintegrasi diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap sektor industri sekaligus memaksimalkan manfaat bagi kesejahteraan buruh.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kenaikan upah minimum memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di sektor industri apabila diimplementasikan secara tepat dan didukung oleh kebijakan pendukung yang memadai. Sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh menjadi kunci utama dalam mewujudkan kebijakan upah minimum yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang berbasis pada kajian ilmiah dan dialog sosial yang konstruktif, kebijakan upah minimum dapat menjadi instrumen strategis dalam menciptakan kesejahteraan buruh tanpa menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan sektor industri.

REFERENSI

- Boeri, T., & van Ours, J. (2021). *The economics of imperfect labor markets* (3rd ed.). Princeton University Press.
- International Labour Organization. (2022). *Global wage report 2022–23: The impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power*. International Labour Office.
- Kaufman, B. E. (2020). Labor market institutions and wage determination. *Journal of Labor Research*, 41(2), 123–145. <https://doi.org/10.1007/s12122-020-09302-1>
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- OECD. (2020). *OECD employment outlook 2020: Worker security and the COVID-19 crisis*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1686c758-en>
- Suryahadi, A., Widyanti, W., & Perwira, D. (2019). Dampak kebijakan upah minimum terhadap ketenagakerjaan dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.23917/jep.v20i1.7654>